



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Jendral Sudirman Painan – Sago Telp/Fax (0756) 7464239



**REVISI RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2016-2021

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (*unified budget*) menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan (*sustainable program*) berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Meskipun terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunan Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan kesisteman agar pembangunan perangkat keras (*hardware*) seiring sejalan dan terpadu dengan pembangunan perangkat lunak (*software*) serta pengembangan sumber daya manusia (*brainware*). Selain itu perencanaan yang dilakukan harus tetap bersifat rasional (terukur secara kuantitatif), menyeluruh/komprehensif (mencakup semua aspek/subsistem) dan terpadu/integral (antar aspek/subsistem), mengikuti perkembangan (konstektual), antisipatif (responsif) serta berkelanjutan (berkesinambungan).

Painan, 28 Desember 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I : Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sistematika Penulisan	2
BAB II : Gambaran Umum Pelayanan Dinas Perhubungan	4
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	12
2.3. Kinerja Pelayanan	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	19
BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	21
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo serta renstra Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Sumatera Barat	22
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	25
BAB IV : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	26
4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan	26
4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah	27

BAB V	: Strategi dan Arah Kebijakan	32
	5.1. Strategi	32
	5.2. Kebijakan	32
BAB VI	: Rencana Program dan Kegiatan	34
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	34
	6.2 Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif	36
BAB VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang dan Unsur	43
BAB VIII	: Penutup	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	12
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai	13
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	13
Tabel 2.2.4	Aset/Modal Dinas	14
Tabel 2.3.1	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	15
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaa Pelayanan Dinas Perhubungan	17
Tabel 4.2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	26
Tabel 4.3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	27
Tabel 5.2.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom up serta perencanaan top down.

Menyelaraskan dengan amanat yang terkandung dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Renja SKPD sebagai penjabaran Rensta SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perhubungan menerjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam perspektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan “Good Governance“ yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur Negara yang Bersih, serta tanggung jawab dan profesional dalam masing- masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (*Civilized Society*) sebagai bagian integral dan sistem dan proses pembangunan daerah.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud diperlukan dukungan aparatur yang memiliki profesional, adaptif responsif, tanggap dan aspiratif serta pembiayaan yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran Dinas, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan selama 5 tahun ke depan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah untuk menjabarkan Rencana Makro Visi, Misi dan program Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun **2016 – 2021**.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 adalah :

- 1) Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- 2) Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang- Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
- 8) SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10) Undang-Undang No 25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan Rencana Strategis (Renstra), maksud dan tujuan, landasan hukum dan kedudukan dan peranan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, serta sistematika.

Bab 2 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Bab 3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian serta renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran

Memuat Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan serta Tujuan dan sasaran Jangka Menengah.

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat Strategi yang akan dilakukan serta kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan

Memuat Rencana Program dan Kegiatan (Program dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan, Program dan Kegiatan Lintas, serta Program dan Kegiatan Kewilayahan), serta Pendanaan Indikatif.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan dan Bidang dan Unsur

Pada bagian ini dikemukakan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Tupoksi OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 :

Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi di bidang perhubungan;

- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang sarana prasarana dan keselamatan jalan, bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perhubungan laut dan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan;
- f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan bidang perhubungan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hokum; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan dinas perhubungan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas perhubungan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, perencanaan dan pelaporan dinas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan

Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- c. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
- d. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja dinas;

- e. pelaksanaan penyusunan renstra dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran dinas;
- g. penyusunan program kerja tahunan dinas;
- h. pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- j. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- k. pengkoordinasi dan penghimpunan laporan Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara, Standar Operasional Pelayanan, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja dan laporan lainnya;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan dinas

Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi umum;
- b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud Seksi Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi lalu lintas;
- b. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- c. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten;
- d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- e. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
- f. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten dan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
- g. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
- h. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- i. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Angkutan

Seksi Angkutan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait angkutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi angkutan;
- b. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
- c. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- d. penetapan rancana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
- e. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;

- f. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
- g. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten;
- h. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
- i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- j. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- k. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
- l. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- m. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- n. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam dalam daerah kabupaten; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengujian Sarana

Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pengujian sarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengujian Sarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi pengujian sarana mengacu pada rencana kerja bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan di seksi pengujian sarana; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Prasarana

Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan, dan pegerasian prasarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pegerasian prasarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pegerasian prasarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Prasarana

Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Perencanaan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi perencanaan prasarana;
- b. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- c. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembangunan Prasarana

Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pembangunan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi Pembangunan prasarana;
- b. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- c. Penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
- d. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
- e. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- f. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;

- g. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- h. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan, izin operasi prasarana perkerataapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
- i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengoperasian Prasarana

Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan Pengoperasian Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi pengoperasian prasarana;
- b. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- c. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- d. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- e. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- f. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

Bidang Pengembangan Dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Lingkungan Perhubungan

Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Lingkungan Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- b. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan Keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Keselamatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan parasarana;
- b. penyiapan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyiapan fasilitasi keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Rincian Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Bagan Struktur Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 1** Renstra Dinas Perhubungan Pesisir Selatan 2016-2021.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Eselon II.b)
2. Sekretaris (Eselon III.a) dibantu 2 (tiga) Sub Bagian (Eselon IV.a) yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (Eselon III.b) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Lalu Lintas, Seksi Angkutan, dan Seksi Pengujian Sarana;
4. Bidang Prasarana (Eselon III.b) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Perencanaan Prasarana, Seksi Pembangunan Prasarana dan Seksi Pengoperasian Prasarana;
5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan (Eselon III.b) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, Seksi Lingkungan Perhubungan, dan Seksi Keselamatan;

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT / GOL	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
2	PEMBINA TK.I / IV b	1
3	PEMBINA/ IV a	3
4	PENATA TK. I / III d	4
5	PENATA / III c	6
6	PENATA MUDA TK.I / III b	5
7	PENATA MUDA / III a	1
8	PENGATUR TK.I / II d	3
9	PENGATUR / II c	18
10	PENGATUR MUDA TK.I / II b	3
11	PENGATUR MUDA / II a	2
12	JURU TK.I / I d	-
13	JURU / I c	1
14	JURU MUDA TK. I / I b	-
15	JURU MUDA / I a	-
JUMLAH		47

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	S3	-
2	S2	6
3	S1 / D4	11
4	D III	2
5	D II	-
6	SMU/SMA Sederajat	27
7	SMP	-
8	SD	1
	<i>JUMLAH</i>	<i>47</i>

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

NO.	JABATAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	STRUKTURAL	17
2	FUNGSIONAL UMUM	30
	<i>JUMLAH</i>	<i>47</i>

b. Aset/Modal

Asset Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.4
Aset/Modal Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Asset	Jumlah	Satuan	Harga (Rp.)
1	Tanah	3	Bidang	1.510.736.380
2	Peralatan dan Mesin	1.054	Unit	5.249.018.116
3	Gedung dan Bangunan	36	Unit	2.873.269.887
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	7	Buah	2.255.578.560
5	Aset Tetap lainnya	1	Buah	604.560.000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	Unit	-
7	Aset lainnya	20	Buah	75.854.240
	Jumlah	1.121		12.569.017.183

2.3 Kinerja Pelayanan

Dinas Perhubungan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah.

Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dinas Perhubungan Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2. Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas
3. Peningkatan SDM

Tabel 2.3.1
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Terlaksananya program kerja dinas sesuai dengan sasarannya	9 program 32 Kegiatan	10 program 39 kegiatan	9 program 37 kegiatan	12 program 39 kegiatan	13 program 40 Kegiatan	9 program 32 Kegiatan	10 program 39 kegiatan	9 program 37 kegiatan	12 program 38 kegiatan	13 program 37 kegiatan	100	100	100	97	93
2	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	100	100	100	100
3	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan:															
	- Traffic Light	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Unit	100	100	100	100	100
	- Rambu-Rambu	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50 Unit	100	100	100	100	100
	- Halte	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	100	100	100	100	100
	- Marka	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	714,20 M	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	714,20 M	100	100	100	100	100
4	Tersedianya/terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan:															
	- Rambu-Rambu Standart	85 bh	100 bh	150 bh	200 bh	180 bh	60 bh	78 bh	100 bh	116 bh	180 bh	70,59	78,00	66,67	58	100
	- RPPJ	15 bh	15 bh	20 bh	15 bh	8 bh	5 bh	6 bh	10 bh	10 bh	8 bh	33,33	40	50	66,67	100
	- Marka Jalan	3.000 M	4.500 M	5.000 M	5.500 M	5.440 M	2.050 M	2.540 M	4.000 M	5.320 M	5.440 M	68,33	56,44	80	96,73	100
	- Pagar Pengaman Jalan	-	-	-	200 M	100 M	-	-	-	0	100 M	-	-	-	-	100
	- Pengadaan APIL	1 Unit	-	1 Unit		-	1 Unit	-	1 Unit	-	-	100	-	100	-	-

No	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5	Terlaksananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	100	100	100	100	100
6	Terpeliharanya bus perhubungan sebagai alat transportasi pelajar	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	100	100	100	100
7	Jumlah peserta sosialisasi perhubungan laut	-	75 orang	-	-	225 orang	-	75 Orang	-	-	150 orang	-	100	-	100	66,67
8	Terlaksananya terhadap muatan kapal	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	-	-	100	100	100
9	Jumlah kendaraan yang melakukan uji ulang KIR	2.500	2.500	3.000	4.000	7.500	3.413	3.935	5.390	5.867	9.954	136,52	157,40	179,66	146,67	132,77
10	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui unit penerangan keliling	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100
11	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media on line/website	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100	100

Tabel 2.3.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
Hasil pajak daerah																	
Hasil retribusi daerah	948.944.500	801.472.800	971.692.800	1.742.592.800	2.107.300.000	669.417.050	708.770.810	1.695.880.459	1.577.665.844	2.282.367.080	70,54	88,43	174,53	90,54	108,31	289.588.875	403.237.508
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
Dana Perimbangan	2.445.025.000	2.591.510.000	3.331.157.317	4.009.286.315	4.457.612.450	2.379.799.319	2.554.602.072	3.290.901.512	3.926.778.432	3.915.469.875	97,33	98,58	98,79	97,94	87,84	504.146.863	383917639
- Bagi Hasil Pajak/ bagi hasil bukan pajak																	
- Dana Alokasi Umum	1.617.355.000	2.338.565.000	2.929.745.317	3.551.334.315	3.781.354.450	1.600.236.320	2.302.336.072	2.892.141.512	3.471.288.432	3.241.949.875	98,94	98,45	98,72	97,75	85,74	540.999.863	410.428.389
- Dana Alokasi Khusus	827.670.000	252.945.000	401.412.000	457.952.000	676.258.000	779.562.999	252.266.000	398.760.000	455.490.000	673.520.000	94,19	99,73	99,34	99,46	99,60	(37.853.000)	(26.510.750)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah																	
- Pendapatan Hibah																	
- Dana Darurat																	
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																	
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung	2.777.176.396	2.792.153.949	2.963.179.621	2.996.697.675	3.392.998.942	2.770.610.006	2.752.626.730	2.751.178.310	2.923.011.789	3.315.416.226	99,76	98,58	92,85	97,54	97,71	153.955.637	136.201.555
- Belanja pegawai	2.777.176.396	2.792.153.949	2.963.179.621	2.996.697.675	3.392.998.942	2.770.610.006	2.752.626.730	2.751.178.310	2.923.011.789	3.315.416.226	99,76	98,58	92,85	97,54	97,71	153.955.637	136.201.555
- Belanja bunga																	
- Belanja subsidi																	
- Belanja hibah																	
- Belanja bantuan sosial																	
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa																	

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Belanja tidak terduga																	
Belanja Langsung	2.445.025.000	2.591.510.000	3.331.157.317	4.009.286.315	4.457.612.450	2.379.799.319	2.554.602.072	3.290.901.512	3.926.778.432	3.915.469.875	97,33	98,58	98,79	97,94	87,84	503.146.862	383.917.639
- Belanja pegawai	45.100.000	111.750.000	201.110.000	137.450.000	116.300.000	40.300.000	111.500.000	192.945.000	115.100.000	107.000.000	89,36	99,78	95,94	83,74	92,00	17.800.000	16.675.000
- Belanja barang dan jasa	1.563.895.000	2.116.870.000	2.592.741.317	3.041.234.315	3.113.185.260	1.551.595.320	2.082.966.922	2.564.016.957	2.983.538.432	2.701.353.775	99,21	98,40	98,89	98,10	86,77	387.322.565	287.439.614
- Belanja modal	836.030.000	362.890.000	537.306.000	830.602.000	1.228.127.190	787.903.999	360.135.150	533.939.555	828.140.000	1.107.116.100	94,24	99,24	99,37	99,70	90,15	98.024.298	79.803.025
TOTAL																	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Urusan Perhubungan

a. Tantangan

1. Belum Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan (Halte, Rambu-rambu Lalu Lintas, RPPJ, Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan (Guardrail), Traffic Light, Warning Light, Lampu Penerangan Jalan, Papan Nama Jalan, Deliniator, dan sebagainya)
2. Belum Optimalnya pengawasan dan pengendalian angkutan.
3. Belum optimalnya Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan
5. Belum terpenuhinya alat uji dan fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
6. Belum terpenuhinya pelayanan dan fasilitas terminal dan parkir

b. Peluang

Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dan kelancaran dalam transportasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

a. Kesekretariatan

1. Masih kurangnya kualitas SDM di bidang Teknis Perhubungan, seperti : jurusan LLAJ, LLASDP, Transportasi Darat, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Diklat Teknis Perhubungan.
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi

b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

1. Masih beroperasinya angkutan perdesaan yang sudah berusia tua karena tidak adanya peremajaan angkutan
2. Masih kurang disiplin dan minimnya pengetahuan tata tertib berlalulintas pengemudi angkutan umum
3. Masih adanya lokasi rawan kemacetan
4. Masih leluasa beroperasinya angkutan penumpang umum ilegal
5. Belum maksimalnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas serta perlengkapan jalan yang sudah terpasang, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, warning light, marka jalan, pagar pengaman jalan, lampu penerangan jalan, patok pengaman jalan, paku marka jalan, cermin lalu lintas, zona selamat sekolah, RPPJ dan papan nama jalan
6. Belum maksimalnya pengendalian terhadap daerah rawan kecelakaan
7. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang fungsi dan faedahnya fasilitas perlengkapan jalan
8. Belum terlaksananya secara optimal sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat dan siswa tentang undang-undang 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas angkutan jalan.
9. Belum tersedianya sarana dermaga disetiap titik pemberangkatan penumpang
10. Belum maksimalnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana bantu navigasi
11. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor disebabkan kurangnya alat uji dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor

c. Bidang Pasarana

1. Masih minimnya fasilitas pejalan kaki dan perlengkapan jalan, seperti : halte, zebra cross, trotoar, rambu lalu lintas, traffic light, warning light, lampu penerangan jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, cermin lalu lintas, deliniator, paku marka dll.
2. Masih minimnya sarana bantu navigasi di lokasi yang dianggap rawan pada alur pelayaran.

d. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

1. Masih kurangnya/lemahnya pengawasan terhadap keselamatan perhubungan
2. Belum optimalnya koordinasi ke kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi tentang penyelenggaraan tupoksi perhubungan laut
3. Masih kurangnya sosialisasi/penyuluhan terhadap pemilik moda transportasi
4. Masih kurangnya penanganan pada daerah rawan kecelakaan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”

b. Misi

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang

c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
3. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah Kabupaten Pesisir Selatan

6. Meningkatkan produktivitas masyarakat
7. Mengoptimalkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
8. Mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis
9. Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana
10. Memantapkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah darat dan laut termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten
11. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan keutamaan nilai - nilai luhur budaya lokal yang inklusif
12. Memperkuat modal sosial dan budaya masyarakat
13. Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal dan peningkatan kesejahteraan rakyat
14. Mengembangkan Pertanian pangan serta perikanan dan kelautan yang produktif dan bernilai tambah tinggi
15. Mengembangkan industri pengolahan yang berdaya saing terutama industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan
16. Mengembangkan koperasi, UMKM dan industri yang berdaya saing terutama dalam pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan
17. Mengembangkan wisata daerah
18. Membuka keterisolasian daerah perdesaan dan daerah terpencil
19. Meningkatkan keterkaitan antar wilayah kecamatan dan antara kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten/Kota lain
20. Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis

3.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan Serta Renstra Dinas Perhubungan Sumatera Barat

a. Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

Visi Kementerian Perhubungan 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sedangkan misi dari kementerian Perhubungan yaitu :

1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional
2. Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan
3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi

Adapun tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan meminimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat

Sedangkan sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

- a. Menurunnya angka kecelakaan transportasi
- b. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi

2. Pelayanan Transportasi

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- c. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;

- d. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
- e. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
- f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
- g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;

3. Kapasitas Transportasi

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

- 1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
- 2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
- 3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
- 4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
- 5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Yang berkaitan dengan Program Strategis Kementerian Perhubungan 2015 -2019 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1) Perhubungan Darat

- 1. Pengadaan Bus Angkutan Umum/Pelajar/Mahasiswa sebagai alat transportasi pelajar
- 2. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah yang rawan kecelakaan
- 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan Jalan LLAJ
- 4. Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- 5. Rehabilitasi/ Peningkatan Pembangunan Terminal

2) Perhubungan Laut

- 1. Pengadaan alat bantu sarana navigasi
- 2. Pembangunan Dermaga
- 3. Pemberian izin pass kecil untuk kapal nelayan dan angkutan penumpang

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang perhubungan antara lain :

1. Pembangunan Terminal Type C
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perhubungan
3. Pembangunan dermaga/tambatan Kapal di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pengadaan dan pemasangan serta rehabilitasi kelengkapan jalan.
5. Peningkatan pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

1. Minimnya SDM Teknis Perhubungan ;
2. Masih beroperasinya moda transportasi yang tidak layak ;
3. Belum terlayannya seluruh trayek angkutan ;
4. Masih adanya daerah rawan kecelakaan ;
5. Belum terpenuhi kabutuhan terminal dan dermaga di wilyah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan uji kendaraan ;
7. Kurangnya fasilitas kelengkapan jalan dan sarana navigasi ;
8. Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, lancar, aman dan nyaman guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Visi tersebut mengisyaratkan kondisi yang ideal yaitu terciptanya kualitas pelayanan jasa transportasi yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan memiliki daya saing yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Serta memiliki nilai tambah yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan usaha masyarakat.

Sedangkan **misi** dari Dinas Perhubungan kabupaten Pesisir selatan adalah :

1. Menjalankan Administrasi Perkantoran secara profesional
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
4. Meningkatkan dan memperluas jaringan pelayanan transportasi

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain :

4. Mengendalikan kemacetan dan mengantisipasi kecelakaan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar dan sebagainya.
5. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti penyediaan halte angkutan umum yang layak dan memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi untuk lebih tertib menunggu sarana transportasi umum. Juga keberadaan terminal dengan segala fasilitas penunjang yang layak bagi penumpang / pengguna jasa transportasi umum bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
6. Mengirimkan aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti beberapa Diklat baik Teknis maupun non Teknis juga melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor yang memadai.

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1. Manajemen Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Dalam rangka menciptakan transportasi yang handal aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan angkutan maka perlu dilakukan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan seperti :
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi terminal
 - b. Pembangunan dermaga dan tambatan kapal/perahu

- c. Penyediaan alat uji mekanis dan sarana pendukung pengujian kendaraan bermotor
- d. Pembangunan dan rehabilitasi Halte
- e. Pemasangan dan rehabilitasi rambu-rambu standar, RPPJ, cermin tikungan patok pengaman jalan, paku marka jalan, guard rill, marka jalan, zona selamat sekolah dll.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai pengguna jasa transportasi sangat mutlak untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya disiplin pemakai jalan dan kemampuan petugas operasional di lapangan. Langkah langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Memberikan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan
- b. Meningkatkan kualitas pengusaha angkutan umum
- c. Meningkatkan kualitas petugas operasional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan

Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural
2. Keputusan Bupati Nomor : 34 tahun 2015 tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPTD Terminal dan Perpakiran
4. Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
5. Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
6. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Tempat Khusus Parkir
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 551/179/Kpts/BPTS-PS/2015 tentang penetapan Kawasan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pesisir Selatan

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, maka program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j. Penyediaan makanan dan minuman
 - k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - m. Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS
 - n. Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala bus perhubungan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan PKB
 - c. Diklat Teknis Perhubungan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan :
- a. Monitoring dan evaluasi kegiatan
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Koordinasi pembangunan pelabuhan panasahan carocok painan

- b. Penyusunan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan (dppl) dermaga/ tambatan kapal
 - c. Penyusunan alur jaringan trayek transportasi laut
 - d. Penyusunan dokumen DED dermaga /tambatan kapal
 - e. Penyusunan dokumen UKL/UPL dermaga/tambatan kapal
 - f. Penyusunan fisibility study dermaga/tambatan kapal
 - g. Pengadaan bus sekolah
 - h. Pembangunan dermaga/tambatan/ kapal
 - i. Pembangunan terminal tipe C
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Rehabilitasi/pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas
 - b. Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pos retribusi (TPR)
 - c. Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal dan pelabuhan
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
 - b. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
 - c. Koordinasi dan peningkatan pelayanan angkutan
 - d. Pengawasan dan pengendalian LLAJ
 - e. Operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut
 - f. Pembinaan dan penertiban lalu lintas angkutan laut
 - g. Pelajar pelopor keselamatan belalu lintas
 - h. Pemilihan sopir teladan (Abiyasa)
 - i. Operasional transportasi pelayanan pendidikan
9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pembangunan halte bus
 - b. Pembangunan pagar, taman kantor, dan papan nama (merk dinas)
10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
 - b. Pengadaan pagar pengaman jalan
 - c. Pengadaan patok pengaman jalan (Deliniator)

- d. Pengadaan paku marka jalan
 - e. Pengadaan cermin lalu lintas
 - f. Pengadaan zona selamat sekolah (ZoSS)
 - g. Pengadaan rambu-rambu RPPJ
 - h. Pengadaan warning light solar cell
 - i. Pengadaan dan pemasangan papan nama jalan
 - j. Pengadaan dan pemasangan marka jalan
 - k. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan
11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
 - b. Pengadaan alat uji mekanis PKB
 - c. Pembangunan fasilitas pelayanan PKB
12. Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pelayanan terminal dan perpakiran
 - b. Pengadaaan Alat Parkir Elektrik
13. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Pesisir Selatan ini, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.

Renstra Dinas Perhubungan kabupaten Pesisir ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan rencana tahunan.

Renstra ini dilaksanakan selama periode lima tahun, 2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bertanggungjawab, melakukan pengawasan dan mengevaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 28 Desember 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan transportasi tahun 2016-2021. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas perhubungan ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategik Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2016-2021.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan data, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 28 Desember 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

5.2 Pendanaan Indikatif

Tabel 5.2.1
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 s/d 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Yang Bertanggung jawab	Lokasi		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		20%	970.146.950	20%	904.750.000	20%	978.400.000	20%	1.265.400.000	20%	1.265.400.000	20%	1.265.400.000	100%	6.649.496.950				
Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik dan profesional	Lamanya pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya tertib administrasi perkantoran dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lamanya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	88.693.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	72 Bulan	458.693.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lamanya penggunaan jasa administrasi keuangan		12 Bulan	53.400.000	12 Bulan	57.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	72 Bulan	390.400.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penggunaan jasa kebersihan kantor		3 Orang	32.581.000	3 Orang	36.000.000	3 Orang	43.000.000	3 Orang	55.000.000	3 Orang	55.000.000	3 Orang	55.000.000	3 Orang	55.000.000	3 Orang	276.581.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
Tersedianya sarana dan prasarana kerja guna peningkatan ketertiban urusan administrasi	Lamanya pemeliharaan peralatan kerja	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai kebutuhan	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	Lamanya pemakaian jasa perbaikan peralatan kerja		12 Bulan	15.042.450	12 Bulan	16.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	72 Bulan	151.042.450	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik dan profesional	Lamanya pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya tertib administrasi perkantoran dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lamanya penggunaan alat tulis kantor		12 Bulan	34.965.100	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	72 Bulan	249.965.100	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lamanya penggunaan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	85.573.400	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	72 Bulan	515.573.400	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lamanya penggunaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bulan	5.682.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	72 Bulan	63.682.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
Tersedianya sarana dan prasarana kerja guna peningkatan ketertiban urusan administrasi	Lamanya pemeliharaan peralatan kerja	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai kebutuhan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		35 umit dan 17 buah	207.900.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000		1.307.900.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik dan profesional	Lamanya pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya tertib administrasi perkantoran dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		3 Media	20.400.000	3 Media	20.400.000	3 Media	20.400.000	3 Media	20.400.000	3 Media	20.400.000	3 Media	20.400.000	3 Media	122.400.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
			Penyediaan makanan dan minuman	Lamanya penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	16.800.000	12 Bulan	25.350.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	72 Bulan	202.150.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lamanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 Bulan	204.650.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	215.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	72 Bulan	1.419.650.000	Dinas Perhubungan	Indonesia		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Lamanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		12 Bulan	157.200.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	72 Bulan	1.062.200.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Jumlah jasa tenaga kerja non PNS		1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	78.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
			Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen penunjang operasional perencanaan dan pelaporan		7 Dokumen	34.260.000	8 Dokumen	37.000.000	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	351.260.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
						Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		20%	262.059.000	20%	837.750.000	20%	6.650.000.000	20%	4.100.000.000	20%	4.100.000.000	20%	4.100.000.000	100%	19.899.809.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Yang Bertanggung jawab	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional		-	-	6 unit	545.000.000	6 unit	2.700.000.000	7 unit	150.000.000	6 unit	150.000.000	6 unit	150.000.000	31 unit	3.695.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai	
Tersedianya sarana dan prasarana kerja guna peningkatan ketertiban urusan administrasi	Lamanya pemeliharaan peralatan kerja	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai kebutuhan	Pengadaan Meubiler	Jumlah meubiler dalam keadaan baik		-	-	-	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	4 Paket	800.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		1 Paket	40.750.000	3 paket	67.750.000	3 paket	100.000.000	3 paket	100.000.000	3 paket	100.000.000	3 paket	100.000.000	16 paket	508.500.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Lamanya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		12 Bulan	221.309.000	12 Bulan	225.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	72 Bulan	1.646.309.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai	
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Pembangunan Tempat Parkir	Jumlah tempat parkir yang dibangun		-	-	-	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi	Pemeliharaan rutin /berkala Penerangan jalan umum	Lamanya pemeliharaan penerangan umum		-	-	-	12 Bulan	3.300.000.000	12 Bulan	3.300.000.000	12 Bulan	3.300.000.000	12 Bulan	3.300.000.000	48 Bulan	13.200.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur		20%	-	116 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	596 Stel	1.250.000.000			
Meningkatkan disiplin aparaturnya	Jumlah aparaturnya Dinas Perhubungan	Meningkatnya disiplin aparaturnya dalam bertugas dan berpakaian	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		-	-	116 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	596 Stel	1.250.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya		20%	50.000.000	20%	45.000.000	20%	270.000.000	20%	270.000.000	20%	270.000.000	20%	270.000.000	100%	1.175.000.000			
Meningkatkan kemampuan aparaturnya yang memiliki kompetensi	Jumlah aparaturnya yang memiliki kompetensi	Meningkatnya kemampuan aparaturnya yang berkualitas di	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal		1 Paket	50.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	6 Paket	275.000.000	Dinas Perhubungan	Indonesia	
			Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan PKB	Jumlah pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan PKB		-	-	-	3 Orang	75.000.000	3 Orang	75.000.000	3 Orang	75.000.000	3 Orang	75.000.000	3 Orang	75.000.000	12 Orang	300.000.000	Dinas Perhubungan	Indonesia
			Diklat Teknis Perhubungan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis perhubungan		-	-	-	5 Orang	150.000.000	5 Orang	150.000.000	5 Orang	150.000.000	5 Orang	150.000.000	5 Orang	150.000.000	20 Orang	600.000.000	Dinas Perhubungan	Indonesia
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		20%	52.707.790	20%	55.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	100%	507.707.790			
Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik dan profesional	Lamanya pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya tertib administrasi perkantoran dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Lamanya Monitoring dan Evaluasi kegiatan		12 Bulan	52.707.790	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	72 Bulan	507.707.790	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		20%	509.582.540	20%	890.000.000	20%	1.025.000.000	20%	1.025.000.000	20%	1.025.000.000	20%	1.025.000.000	100%	5.049.582.540			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Yang Bertanggung jawab	Lokasi		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Koordinasi Pembangunan Pelabuhan	Lamanya koordinasi Pembangunan Pelabuhan		12 Bulan	63.983.600	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	72 Bulan	533.983.600	Dinas Perhubungan			
			Penyusunan laporan pelaksanaan Dokumen Lingkungan Dermaga/ Tambatan Kapal	Jumlah Dokumen Lingkungan Dermaga/ Tambatan Kapal		-	-	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	45.000.000	12 Dokumen	180.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
Adanya pemahaman tentang pentingnya tertib dalam berlalu lintas	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi dalam berlalu lintas	Terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas dan pengoperasian angkutan dijalan	Penyusunan Alur Jaringan Trayek transportasi Laut	Jumlah peraturan tentang alur jaringan trayek transportasi laut		-	-	1 Perda/Perbup	50.000.000	1 Perda/Perbup	50.000.000	1 Perda/Perbup	50.000.000	1 Perda/Perbup	50.000.000	4 Perda/Perbup	200.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan				
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Penyusunan Dokumen DED Dermaga / Tambatan Kapal	Jumlah Dokumen DED Dermaga/ Tambatan Kapal		1 Paket	3.575.720	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	16 Dokumen	1.503.575.720	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Penyusunan Dokumen UKL/UPL Dermaga/ Tambatan Kapal	Jumlah Dokumen UKL/UPL Dermaga/ Tambatan Kapal		5 Paket	325.664.000	5 Paket	350.000.000	3 Paket	210.000.000	3 Paket	210.000.000	3 Paket	210.000.000	3 Paket	210.000.000	22 Paket	1.515.664.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Penyusunan Fisibility Study Dermaga/ Tambatan Kapal	Jumlah Dokumen Fisibility Study Dermaga/ Tambatan Kapal		2 Paket	116.359.220	3 Paket	170.000.000	3 Paket	170.000.000	3 Paket	170.000.000	3 Paket	170.000.000	3 Paket	170.000.000	17 Paket	966.359.220	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Perencanaan Pembangunan Dermaga/ Tambatan Kapal Sei Gemuruh	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dermaga/ Tambatan Kapal Sei Gemuruh		-	-	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	Dinas Perhubungan	Kecamatan Koto XI Tarusan
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		20%	362.564.470	20%	476.285.220	20%	740.000.000	20%	800.000.000	20%	800.000.000	20%	800.000.000	100%	3.978.849.690				
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	Jumlah Terminal/ Pelabuhan yang dipelihara		1 Paket	88.693.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	6 Paket	1.838.693.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas yang dipelihara	Jumlah Alat Keselamatan Lalu Lintas yang dipelihara		3 Paket	104.197.260	2 Paket	66.000.000	4 Paket	190.000.000	4 Paket	250.000.000	4 Paket	250.000.000	4 Paket	250.000.000	18 Paket	1.110.197.260	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pos retribusi (TPR) yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pos retribusi (TPR) yang dipelihara		2 Paket	169.674.210	1 Paket	60.285.220	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	7 Paket	1.029.959.430	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Program peningkatan pelayanan Angkutan	Persentase peningkatan pelayanan angkutan		20%	818.235.960	20%	3.395.067.000	20%	1.608.000.000	20%	1.380.000.000	20%	1.380.000.000	20%	1.380.000.000	100%	9.961.302.960				
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah Dokumen jasa angkutan				1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
Adanya pemahaman tentang pentingnya tertib dalam berlalu lintas	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi dalam berlalu lintas	Terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas dan pengoperasian angkutan dijalan	Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan				6 Lokasi	180.000.000	6 Lokasi	180.000.000	6 Lokasi	180.000.000	6 Lokasi	180.000.000	6 Lokasi	180.000.000	24 Lokasi	720.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Penunjang Kegiatan WTN	Jumlah Penghargaan bidang lalu lintas		Piala WTN	63.966.800	Piala WTN	75.000.000	Piala WTN	100.000.000	Piala WTN	100.000.000	Piala WTN	100.000.000	Piala WTN	100.000.000	Piala WTN	100.000.000	Piala WTN	538.966.800	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
Meningkatkan pelayanan transportasi	Lamanya pelayanan transportasi	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Lamanya Pengawasan dan Pengendalian LLAJ		12 Bulan	209.879.500	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	370.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	72 Bulan	1.579.879.500	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Yang Bertanggung jawab	Lokasi		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan pelayanan transportasi	Lamanya pelayanan transportasi	Meningkatnya pelayanan transportasi laut	Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut	Lamanya Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut		12 Bulan	160.761.500	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	260.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	72 Bulan	1.220.761.500	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
Adanya pemahaman tentang pentingnya tertib dalam berlalu lintas	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi dalam berlalu lintas	Terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas dan pengoperasian angkutan dijalan	Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut	Lamanya Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut		12 Bulan	112.792.120	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	72 Bulan	712.792.120	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas				1 Paket	25.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	5 Paket	345.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pemilihan Sopir Teladan (Abyasa)	Jumlah Pemilihan Sopir Teladan (Abyasa)				1 Paket	25.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	5 Paket	225.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
Meningkatkan pelayanan transportasi	Lamanya pelayanan transportasi	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Operasional Transportasi Pelayanan pendidikan	Lamanya Operasional Transportasi Pelayanan pendidikan		12 Bulan	270.836.040	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	398.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	350.000.000	72 Bulan	2.068.836.040	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan		20%	664.551.000	20%	2.350.067.000	20%	6.100.000.000	20%	4.100.000.000	20%	6.100.000.000	20%	4.100.000.000	100%	23.414.618.000				
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Pembangunan halte bus	Jumlah Pembangunan halte bus						4 Unit	300.000.000	4 Unit	300.000.000	4 Unit	300.000.000	4 Unit	300.000.000	16 Unit	1.200.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
Tersedianya sarana dan prasarana kerja guna peningkatan ketertiban urusan administrasi	Lamanya pemeliharaan peralatan kerja	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai kebutuhan	Pembangunan pagar, taman kantor, dan papan nama (merk dinas)	Jumlah Pembangunan pagar, taman kantor, dan papan nama (merk dinas)						1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	Dinas Perhubungan	IV Jurai		
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Pengadaan Bus Sekolah	Jumlah Pengadaan Bus Sekolah		1 Unit	664.551.000	1 Unit	450.067.000	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	14 Unit	7.114.618.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
Melakukan pembangunan terminal dan dermaga yang menjadi simpul transportasi di kecamatan-kecamatan Kabupaten pesisir	Jumlah terminal dan dermaga	Terbangunnya terminal dan dermaga	Pembangunan Dermaga/ Tambatan Kapal	Jumlah Dermaga/ Tambatan Kapal yang dibangun				1 Dermaga	1.900.000.000	1 Dermaga	2.000.000.000	1 Dermaga	2.000.000.000	1 Dermaga	2.000.000.000	1 Dermaga	2.000.000.000	5 Dermaga	9.900.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pembangunan Terminal Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C					1 Terminal	2.000.000.000			1 Terminal	2.000.000.000					2 Terminal	4.000.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah Alat pengendali dan pengamanan lalu lintas		20%	371.530.000	20%	155.500.000	20%	5.455.400.000	20%	5.396.000.000	20%	5.396.000.000	20%	5.396.000.000	100%	21.189.930.000				
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas		1 Paket	130.530.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	216.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	6 Paket	846.530.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah Pengadaan Pagar Pengaman Jalan		1 Paket	166.000.000,00			1 Paket	347.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	4 Paket	1.563.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pengadaan Patok Pengaman Jalan (Deliniator)	Jumlah Pengadaan Patok Pengaman Jalan (Deliniator)						1 Paket	81.400.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	85.000.000	4 Paket	336.400.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pengadaan Paku Marka Jalan	Jumlah Pengadaan Paku Marka Jalan						1 Paket	85.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	85.000.000	4 Paket	340.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pengadaan Cermin Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan Cermin Lalu Lintas							1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	4 Paket	1.000.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)							10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	40 Paket	2.000.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Pengadaan Rambu-rambu RPPJ	Jumlah Pengadaan Rambu-rambu RPPJ						1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	4 Paket	600.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Yang Bertanggung Jawab	Lokasi		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Pengadaan Warning Light Solar Cell	Jumlah Pengadaan Warning Light Solar Cell						12 Set	1.200.000.000	12 Set	1.200.000.000	12 Set	1.200.000.000	12 Set	1.200.000.000	48 Set	4.800.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan						1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	4 Paket	800.000.000	Dinas Perhubungan	IV Jurai		
			Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan						1 Paket	75.000.000	1 Paket	105.500.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	4 Paket	980.500.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Jumlah Lampu Penerangan Jalan yang terpasang						6 Lokasi	2.226.000.000	6 Lokasi	2.226.000.000	6 Lokasi	2.226.000.000	6 Lokasi	2.226.000.000	24 Lokasi	8.904.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor						20%	342.033.840	20%	350.000.000	20%	3.970.000.000	20%	1.490.000.000	20%	1.490.000.000	100%	3.592.033.840		
Meningkatkan pelayanan transportasi	Lamanya pelayanan transportasi	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Lamanya pelayanan pengujian kendaraan bermotor						12 Bulan	342.033.840	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	470.000.000	12 Bulan	470.000.000	72 Bulan	2.572.033.840	Dinas Perhubungan	IV Jurai		
			Pengadaan Alat Uji Mekanis PKB	Jumlah Pengadaan Alat Uji Mekanis PKB						3 Unit	3.000.000.000	3 Unit	520.000.000	3 Unit	520.000.000	3 Unit	520.000.000	3 Unit	520.000.000	Dinas Perhubungan	IV Jurai		
			Pembangunan Fasilitas Pelayanan PKB	Jumlah Pembangunan Fasilitas Pelayanan PKB						1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	Dinas Perhubungan	IV Jurai		
			Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelayanan PKB	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelayanan PKB						1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	Dinas Perhubungan	IV Jurai		
			Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran	Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran						20%	272.034.700	20%	150.000.000	20%	626.000.000	20%	1.030.000.000	20%	1.030.000.000	100%	2.388.034.700		
Meningkatkan pelayanan transportasi	Lamanya pelayanan transportasi	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Pelayanan terminal dan perparkiran	Lamanya Pelayanan Terminal dan Perparkiran						12 Bulan	272.034.700,00	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	376.000.000	12 Bulan	280.000.000	72 Bulan	1.638.034.700	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pengadaan Alat Parkir Elektrik	Jumlah Pengadaan Alat Parkir Elektrik						1 Paket	250.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	750.000.000	Dinas Perhubungan	IV Jurai		
Melaksanakan Pemungutan PAD di Sektor Perhubungan Darat		Terpenuhinya target PAD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah						20%	210.753.040	20%	250.000.000	20%	590.000.000	20%	350.000.000	20%	350.000.000	100%	2.100.753.040		
			Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Lamanya Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah						12 Bulan	210.753.040	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	590.000.000	12 Bulan	350.000.000	72 Bulan	2.100.753.040	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
											4.886.199.290		#####		28.362.800.000		21.556.400.000		23.556.400.000		21.556.400.000		110.027.618.510

Tabel 4.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

VISI : Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, lancar, aman dan nyaman guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat											
MISI I : Menjalankan Administrasi Perkantoran Secara Profesional											
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Strategi	Arah Kebijakan
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik dan profesional	Lamanya pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya tertib administrasi perkantoran dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Lamanya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Melaksanakan administrasi perkantoran sesuai dengan peraturan yang berlaku	Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, cepat dan tepat
			Lamanya penggunaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
			Jumlah penggunaan jasa kebersihan kantor	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang		
			Lamanya penggunaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
			Lamanya penggunaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
			Lamanya penggunaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
			Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media		
			Lamanya penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
			Lamanya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
			Lamanya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
			Jumlah jasa tenaga kerja non PNS	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang		
			Jumlah dokumen penunjang operasional perencanaan dan	7 dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen		
			Lamanya Monitoring dan Evaluasi kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
Tersedianya sarana dan prasarana kerja guna peningkatan ketertiban urusan administrasi	lamanya pemeliharaan peralatan kerja	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan kebutuhan	Lamanya pemakaian jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang memadai dibidang administrasi	Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
	Jumlah sarana dan prasarana kerja	Tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan kebutuhan	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35 unit dan 17 buah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		

		Tersedianya meubiler yang memadai	Jumlah meubiler dalam keadaan baik	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
		Tersedianya pagar, taman kantor dan papan nama (merk dinas)	Jumlah Pembangunan pagar, taman kantor, dan papan nama (merk dinas)	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
Meningkatkan disiplin aparatur	Jumlah aparatur Dinas Perhubungan	Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan berpakaian	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	116 Stel	120 Stel	120 Stel	120 Stel	120 Stel	Melakukan penyeragaman dalam berpakaian	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
Meningkatkan kemampuan aparatur yang dibutuhkan dalam tata cara pemerintahan yang baik	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi	Meningkatnya kemampuan aparatur yang berkualitas di bidang administrasi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Mengirimkan aparatur untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur
			Jumlah pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan PKB	-	-	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang		
			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis perhubungan	-	-	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang		

MISI II : Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dalam rangka menciptakan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Strategi	Arah Kebijakan
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Adanya pemahaman tentang pentingnya tertib dalam berlalu lintas	Pembinaan dan sosialisasi dalam berlalu lintas	Terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas dan pengoperasian angkutan dijalan	Lamanya Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Pembinaan dan sosialisasi dalam berlalu lintas dan angkutan
			Jumlah Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	-	-	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi		
			Jumlah Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Melakukan pemilihan pelajar pelopor dalam berlalu lintas	
			Jumlah Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa)	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Melakukan pemilihan sopir teladan	
			Jumlah Penghargaan bidang lalu lintas	Piala WTN	Piala WTN	Piala WTN	Piala WTN	Piala WTN	Piala WTN	Menciptakan kawasan tertib lalu lintas	
			Jumlah peraturan tentang alur jaringan trayek transportasi laut	-	-	1 Perda/ Perbup	1 Perda/ Perbup	1 Perda/ Perbup	1 Perda/ Perbup	melakukan penyusunan alur trayek transportasi laut	

MISI III : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Transportasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Strategi	Arah Kebijakan
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-	6 Unit	6 Unit	7 Unit	6 Unit	6 Unit	Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
			Jumlah tempat parkir yang dibangun	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		
			Lamanya koordinasi Pembangunan Pelabuhan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
			Jumlah Dokumen Lingkungan Dermaga/ Tambatan Kapal	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		

		Lamanya pemeliharaan penerangan umum	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
		Jumlah Terminal/ Pelabuhan yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
		Jumlah Alat Keselamatan Lalu Lintas yang dipelihara	3 Paket	2 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	
		Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pos retribusi (TPR) yang dipelihara	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	

MISI IV : Meningkatkan dan Memperluas Jaringan Pelayanan Transportasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Strategi	Arah Kebijakan
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Melakukan pembangunan terminal dan dermaga yang menjadi simpul transportasi di kecamatan-kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah terminal dan dermaga	Terbangunnya terminal dan dermaga	Jumlah Dermaga/ Tambatan Kapal yang dibangun		1 Dermaga	1 Dermaga	1 Dermaga	1 Dermaga	1 Dermaga	Pembangunan terminal dan dermaga	Menyediakan jaringan pelayanan transportasi yang memadai
			Jumlah Terminal Tipe C			1 Terminal		1 Terminal			
Meningkatkan pelayanan transportasi	Lamanya pelayanan transportasi	Meningkatkan pelayanan transportasi darat	Lamanya Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Melakukan operasional transportasi darat	Pelayanan transportasi darat
			Lamanya Operasional Transportasi Pelayanan pendidikan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
			Lamanya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
			Jumlah Pengadaan Alat Uji Mekanis PKB	-	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		
			Jumlah Pembangunan Fasilitas Pelayanan PKB	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelayanan PKB	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
			Lamanya Pelayanan Terminal dan Perparkiran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
			Jumlah Pengadaan Alat Parkir Elektrik	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
			Jumlah arus penumpang angkutan umum	935.796 Orang	950.000 Orang	980.000 Orang	1.010.000 Orang	1.040.000 Orang	1.070.000 Orang		
			Persentase Angkutan Darat	0,24%	0,25%	0,26%	0,27%	0,28%	0,29%		

			Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	9954 Unit	7.000 Unit	7.200 Unit	7.400 Unit	7.600 Unit	7.800 Unit		
	Lamanya pelayanan transportasi	Meningkatkan pelayanan transportasi laut	Lamanya Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Melakukan operasional transportasi laut	Pelayanan transportasi Laut
			Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga	98.577 Orang	90.000 Orang	95.000 Orang	100.000 Orang	105.000 Orang	110.000 Orang		
			Jumlah Dermaga/ Tambatan Kapal	2 Unit	2 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit		

BAB IV

**INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	935.796	1.108.880	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.250.000
2	Jumlah uji KIR angkutan umum	9954	8895	5200	7200	7700	8200	8700	8700
3	Jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis(Angkutan Umum)	2	2	2	3	4	5	6	6
4	Angkutan darat	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00	1,00
5	Kepemilikan KIR angkutan umum	2,33	4,81	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,7
6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit
7	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
8	Pemasangan rambu-rambu	12,75	2,36	0	2,08	2,16	2,25	2,33	23,93
9	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,05	0,030	0,029	0,028	0,027	0,026	0,027	0,027
10	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	1.285.300	1.108.880	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.250.000
11	Jumlah orang/ barang yang melalui dermaga/ bandara / terminal pertahun	98.577	100.440	115.000	130.000	145.000	160.000	175.000	175.000

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERBUP NO. 50 TAHUN 2016

KETERANGAN:

Eselon II.B = 1
Eselon III.A = 1
Eselon III.B = 3
Eselon IV.A = 11

JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA DINAS (II.B)
Ir. NUZIRWAN. N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

SEKRETARIS (III.A)
N. RISWANDI, ST, M.Si
NIP. 19701219 199903 1 002

**KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
(IV.A)**
VERAWATI, S.Sos
NIP. 19760605 200801 2 029

**KASUBBAG PERENCANAAN
KEUANGAN DAN PELAPORAN (IV.A)**
HILDA ZUSWARNI, SE
NIP. 19750425 200902 2 003

**KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN (III.B)**
PRIS DERIKA HABDI,SH
NIP. 19750101 200701 1 015

**KEPALA BIDANG PRASARANA
(III.B)**
JAFERI, ST
NIP. 19720120 199202 1 001

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN
KESELAMATAN (III.B)**
ABU NASAR, S.Sos
NIP. 196508917 198903 1 007

**KEPALA SEKSI LALU LINTAS
(IV.A)**
ERMAN JUSA,SH
NIP. 19730301 199403 1 003

**SEKSI PERENCANAAN PRASARANA
(IV.A)**
MARTELENA, SH
NIP. 19640405 198908 2 001

**KEPALA SEKSI PEMADUAN MODA DAN
TEKNOLOGI PERHUBUNGAN (IV.A)**
YHOHANA RIZA, SH, M.Si
NIP. 19650808 199303 2 006

**KEPALA SEKSI ANGKUTAN
(IV.A)**
EDDY RICARDO,SH
NIP. 19690514 200604 1 003

**SEKSI PEMBANGUNAN PRASARANA
(IV.A)**
ISWARDI, SH, MM
NIP. 19640401 198602 1 006

**KEPALA SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN
(IV.A)**
ARLIM ARIF
NIP. 19660621 199003 1 006

**KEPALA SEKSI PENGUJIAN SARANA
(IV.A)**
FADLI AMRA, SH, MM
NIP. 19761006 199403 1 001

**KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN
PRASARANA (IV.A)**
DELILAWATI, SH, MM
NIP. 19620524 198903 2 004

**KEPALA SEKSI KESELAMATAN
(IV.A)**
DANOFRIN
NIP. 19621107 198503 1 005

**UNIT
PELAKSANA
TEKNIS DINAS**